



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBANDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 628673

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 760.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/120 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/130 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 790 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/92 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/92 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 88.300.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 55S (T135SEC) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T Tahun 2014, HADIAH Rp. 6.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 300.000



5. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.073.150

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 126.993.216

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.004.366.366

III. HUTANG Rp. 36.282.352

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 968.084.014

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.